

BAB 1

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, isu lingkungan telah berkembang menjadi salah satu agenda yang menarik untuk dibahas. Dunia internasional memandang isu lingkungan laut sebagai masalah bersama lintas batas yang membutuhkan kerjasama global.¹ Permasalahan seperti perubahan iklim, degradasi ekosistem laut, hingga eksploitasi sumber daya kelautan tidak lagi di pandang sebagai permasalahan domestik sebuah negara saja, karakteristik lingkungan laut yang saling terhubung menyebabkan kerusakan yang terjadi d suatu wilayah dapat berdampak terhadap wilayah lain.

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang di dunia yang mencapai sekitar 108.000 km, dengan jumlah pulau sebanyak 17.504.² Sebagai salah satu negara yang terletak di kawasan Asia Pasifik, Indonesia memiliki ekosistem terumbu karang yang luas mencapai 50.875 kilometer persegi atau sekitar 18% dari total terumbu karang dunia.³ Selain itu, ekosistem terumbu karang atau *Coral Reefs* Indonesia merupakan habitat bagi sekitar 590 spesies terumbu karang, namun keadaan terumbu karang Indonesia saat ini cukup memprihatinkan dimana ada

¹ . Yusran and Afri Asnelly, "Kajian Green Politics Theory Dalam Upaya Menangani Krisis Ekologi Laut Indonesia Terkait Aktifitas Illegal Fishing," *Indonesian Journal of International Relations* 1, no. 2 (June 2018), <https://doi.org/10.32787/ijir.v1i2.29>.

² Kemenko Bidang Kementrian dan Investasi, January 6, 2024, <https://www.maritim.go.id/detail/menko-maritim-luncurkan-data-rujukan-wilayah-kelautan-indonesia>.

³ Tetty Magdalena, Kepentingan Indonesia Aktif Dalam CTI (*Coral Triangle Initiative*), 3 No2 (oktober 2016), <https://share.google/WzhNsNXa28hYd2Vq0>.

sekitar 30.5% dalam kategori buruk, 37,3% dalam kondisi baik, dan hanya sekitar 5,3 % terumbu karang yang di kategorikan sangat baik.⁴ Ini menunjukkan bahwa realitanya keberagaman hayati tidak selalu memberikan keuntungan bagi negara kepulauan, sehingga ada banyak tantangan yang harus di selesaikan.

Salah satu kawasan yang memiliki signifikansi strategis dalam isu lingkungan laut global ini adalah Wilayah *Coral Triangle*. Kawasan Segitiga Terumbu Karang atau *Coral Triangle* merupakan wilayah laut dengan kekayaan hayati yang berlimpah serta pusat biodiversitas di dunia, wilayah ini mencakup kawasan di sekitar enam negara kepulauan yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste dan Kepulauan Solomon, yang membentang di perairan pesisir dengan luas wilayah hampir 4 juta mil persegi yang menampung 76% total spesies karang dunia.⁵

Kekayaan hayati dan ekosistem yang luas menjadikan wilayah ini tidak lepas dari ancaman ekosistem kelautan seperti permasalahan overfishing hingga perubahan iklim yang tidak hanya berdampak langsung ke wilayah ini secara langsung namun juga berpengaruh pada kehidupan manusia terutama lebih bagi 120 juta orang yang tinggal di wilayah pesisir dan sekitarnya.⁶ Sebagai respon atas segala tantangan kelautan yang terjadi ini menjadi alasan bagi negara –negara kepulauan yang berada di kawasan ini membentuk suatu kerjasama Internasional yang dikenal sebagai Coral Triangel Initiative On Coral Reefs, Fisheries And Food Security (CTI-CFF).

⁴ Tri Aryono Hadi and Bayu Prayudha, *PUSAT PENELITIAN OSEANOGRAFI LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 2018*, n.d.

⁵ “Atlas Segitiga Karang,” *Coral Triangle Initiative*, n.d., <https://ctatlas.coraltriangleinitiative.org/>.

⁶ “Kehidupan Di Kawasan Segitiga Terumbu Karang Dunia,” 19 Desember 2008, n.d., https://www.ubb.ac.id/index.php?page=artikel_ubb&&id=235&judul=Kehidupan%20di%20Kawasan%20Segitiga%20Terumbu%20Karang%20Dunia.

CTI CFF merupakan kemitraan multilateral yang terdiri dari enam negara anggota yang bekerjasama dan memiliki komitmen dan usaha untuk melestarikan sumber daya laut dan kehidupan pesisir dengan mengatasi isu –isu seperti ketahanan pangan dan keanekaragaman hayati laut serta perubahan iklim.⁷ Dengan beranggotakan enam negara di kawasan Segitiga Terumbu Karang yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, Timor-Leste, dan Kepulauan Solomon. Indonesia hadir sebagai pencetus awal kerjasama ini, institusi ini lahir dari inisiatif presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2006 silam yang di sampaikan melalui pesan resmi kepada *Convention on Biological Diversity* (CBD) di Brasil pada tahun 2006, dan diluncurkan secara resmi pada APEC Summit di Sydney, Australia pada September 2007, dan mengajak enam negara di kawasan segitiga terumbu karang yang disebut CT6, dengan tujuan untuk mengatasi ancaman kerusakan terumbu karang, bakau, perikanan dan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat pesisir akibat perubahan iklim.⁸

Melalui kerjasama CTI-CFF negara anggota berupaya untuk mengatasi permasalahan yang sama di kawasan ini, dalam menghadapi permasalahan lingkungan yang bersifat lintas batas ini negara-negara kawasan segitiga terumbu karang menyusun Regional Plan of Action (RPOA). RPOA merupakan dokumen resmi dalam CTI-CFF yang menjadi acuan kerangka kerja regional yang di adopsi dan disepakati oleh enam negara CTI-CFF yang memuat tujuan, target hingga,

⁷ “Coral Triangle Initiative,” blog, *Coral Triangle Initiative On Coral Reefs, Fisheries and Food Security*, n.d., https://www.cticff.org/about/history-cti-cff?utm_source=chatgpt.com.

⁸ Magdalena, Kepentingan Indonesia Aktif Dalam (*Coral Triangle Initiative*).

sasaran kerja untuk konservasi laut.⁹ Kemudian diturunkan Indonesia menjadi National Plan of Action (NPoA) melalui program seperti COREMAP –CTI dan Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM).¹⁰ Indonesia sebagai pencetus awal kerjasama ini dan kelima negara anggota lainnya juga telah meratifikasi Perjanjian tentang Pembentukan Sekretariat Regional Inisiatif Segitiga Karang tentang Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (CTI-CFF), yang melandasi pembentukan Sekretariat Regional yang berpusat di Manado, Indonesia.¹¹ Dengan momentum pendirian Sekretariat Regional Permanen CTI-CFF di Manado tahun 2015 ini semakin menegaskan posisi Indonesia sebagai pusat kelembagaan kerjasama ini.

Indonesia memiliki peran sentral sebagai salah satu negara yang menginisiasi dalam CTI-CFF baik dari sisi implementasi kebijakan atau politik.¹² Indonesia tidak hanya berkontribusi dalam pembentukan kerjasama namun juga aktif menjalankan berbagai program konservasi dan pengelolaan sumber daya laut di tingkat nasional.

Komitmen konservasi laut berkelanjutan memiliki potensi yang menimbulkan konsensus bagi negara anggota termasuk Indonesia sebagai pengagas awal

⁹ Regional Secretariat, *Regional Plan Of Action CTI-CFF* (Manado, North Sulawesi 95254 Indonesia: CTI-CFF Regional Secretariat, 2016), <https://www.coraltriangleinitiative.org/sites/default/files/resources/CTI-CFF%20Regional%20Plan%20Of%20Action%20%28RPOA%29%20.pdf>.

¹⁰ A. P. Anugrah, B. A. Putra, and Burhanuddin, "Implementation of Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF) in Indonesia and Philippines," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 575, no. 1 (October 2020): 012154, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/575/1/012154>.

¹¹ "About CTI-CFF."

¹² Regional Secretariat, "Rencana Aksi Nasional 2.0 CTI-CFF Indonesia 2025-2030," n.d., <https://kkp.go.id/storage/Materi/rencana-aksi-nasional-20-cti-cff-indonesia-2025-203069e983265ee4/materi-69e9832659f54.pdf>.

kerjasama ini, kebutuhan pendanaan untuk pengawasan dan implementasi program menjadi beban tersendiri, situasi ini semakin menarik ketika melihat bahwa Indonesia yang menjadi tuan rumah sejak 2015 hingga saat ini masih mempertahankan keanggotaan dan komitmennya dalam Coral Triangel Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security ini.¹³ Dalam konteks Hubungan Internasional keputusan negara untuk tetap terlibat dalam institusi regional tidak terlepas dari pertimbangan strategis negara, dan bagaimana pertimbangan itu dibentuk serta sejauh mana potensi kerugian ekonomi-politik. Kondisi ini memunculkan pertanyaan bagaimana keanggotaan Indonesia dalam CTI-CFF dalam perspektif Hubungan Internasional, dan alasan Indonesia tetap berkomitmen meskipun terdapat tantangan yang signifikan dalam implementasinya.

Sejumlah penelitian sebelumnya mengkaji kerja sama CTI-CFF yang masih berfokus pada aspek peran implementasi program serta manfaat kerja sama secara umum, sedangkan penelitian tentang keterlibatan Indonesia dalam CTI-CFF ditengah berbagai tantangan implementasi masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dengan upaya mengisi celah dan kesenjangan dengan menganalisis lebih dalam alasan Indonesia tetap mempertahankan keanggotaan dalam CTI-CFF, penelitian ini tidak hanya mengkaji kepentingan politik dan ekonomi, tetapi juga mengkaji faktor-faktor lain ditengah tantangan implementasi yang signifikan dalam kerja sama ini.

¹³ Lestari Maria, "Coral Triangel Initiative On Coral Reefs, Fisheries And Food Security(CTI-CFF) Dalam Upaya Perlindungan Terumbu Karang Di Indonesia," 2025 05 30 Vol 8 No 5 (n.d.).

1.2 Rumusan Masalah

Keterlibatan Indonesia dalam keanggotaan CTI-CFF menunjukkan suatu fenomena yang menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam perspektif hubungan internasional. Di satu sisi kerjasama regional ini memiliki tujuan strategis yang jelas dalam pengelolaan sumber daya laut dan ketahanan pangan di wilayah Segitiga Terumbu Karang, namun disisi lain, Indonesia dalam implementasinya masih memiliki tantangan dan keterbatasan. Namun Indonesia tetap mempertahankan keanggotaannya, mengingat jika secara rasional suatu negara dapat mempertimbangkan untuk mengurangi atau menarik diri. Oleh karena itu permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada upaya untuk menganalisis lebih dalam alasan Indonesia masih mempertahankan keanggotaannya meskipun terdapat tantangan dalam menjalankan kebijakannya.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut dirumuskan pertanyaan penelitiannya adalah, mengapa Indonesia tetap mempertahankan keanggotaannya dalam CTI-CFF meskipun terdapat banyak tantangan dalam pelaksanaannya kebijakan nya.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis alasan Indonesia masih mempertahankan keanggotaan serta keterlibatan dalam CTI-CFF dalam isu ketahanan pangan dan ekonomi

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberikan referensi bagi pembaca yang khususnya mahasiswa Hubungan Internasional dalam memahami studi kerjasama lingkungan Internasional dan dapat memperkaya literature mengenai Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF) dengan menyoroti alasan dibalik komitmen keanggotaan Indonesia dalam kerjasama ini, dengan fokus khusus pada dimensi politik dan ekonomi dalam keanggotaan Indonesia dalam kerjasama CTI-CFF pasca berdirinya Sekretariat Regional di Manado pada tahun 2015 penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah penelitian dan kajian sebelumnya yang masih terbatas dan dapat menjadi bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan evaluasi dan masukan bagi pembuat kebijakan, khususnya lembaga pemerintah yang bergerak di bidang kelautan dan lingkungan dalam merumuskan strategi Indonesai dala, CTI –CFF. Hasil penelitian ini diharapkan membantu mengidentifikasi sejauh mana manfaaf politik dan dan ekonomi indonesia sehingga dapa digunakan sebagai pertimbangan apa yang mendasari alasan Indonesai ada dalam forum kerjasama ini. selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan rujukan bagi lembaga swadaya

masyarakat dan komunitas lingkungan laut dalam memahami dinamika kebijakan Indonesia di kawasan Segitiga Terumbu Karang

1.6 Studi Pustaka

Dalam menjawab pertanyaan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa referensi dari beberapa jurnal yang selaras dengan topik penelitian yang digunakan untuk mengembangkan penelitian, sumber-sumber yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini adalah beberapa referensi yang bersumber dari beberapa artikel jurnal dan buku yang relevan dengan penelitian ini.

Referensi pertama merujuk pada salah satu penelitian yang relevan dalam menjelaskan alasan keikutsertaan Indonesia dalam CTI CFF adalah penelitian yang dilakukan oleh Tety Magdalena dalam artikel yang berjudul “ *KEPENTINGAN INDONESIA AKTIF DALAM CTI(CORAL TRIANGEL*.¹⁴ Artikel ini menjelaskan tentang keterlibatan aktif Indonesia dalam CTI didorong salah satunya oleh kepentingan nasional yang dilihat dari aspek politik dan lingkungan nya.¹⁵ Dari sisi politik Indonesia berupaya membangun citra sebagai negara maritim yang memiliki isu global untuk berkomitmen dalam kerja sama serta memperkuat posisinya di kawasan Asia Pasifik. Selain itu kerjasama ini juga berkaitan dengan upaya Indonesia dalam menjaga keamanan kawasan seperti, membatasi konflik perbatasan laut ataupun kegiatan seperti ilegal fishing. Sedangkan dari sisi ekonomi nya. Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya CTI dalam tata kelola kawasan terumbu karang ini

¹⁴ Magdalena, *Kepentingan Indonesia Aktif Dalam CTI (Coral Triangle Initiative)*.

¹⁵ Magdalena.

sebagai kerjasama yang multilateral antara negara anggota yang sama-sama membahas tentang sumberdaya kelautan serta pelestarian ekosistemnya. Indonesia dan keenam negara anggotanya dapat meningkatkan efektivitas dalam tata kelola global. Penelitian ini juga mengungkapkan keterlibatan Indonesia secara aktif dilatarbelakangi oleh tingginya tingkat kerusakan terumbu karang di kawasan kepulauan ini jika dilihat dari aspek lingkungannya sehingga membutuhkan upaya konservasi secara kolektif karena terumbu karang merupakan habitat yang mendukung ekosistem laut yang berpotensi sebagai sumber pangan sampai pengembangan sektor wisata bahari.¹⁶ Sehingga untuk mencapai semua komitmen itu dibutuhkan kerjasama antar negara terutama negara yang berada di wilayah segitiga terumbu karang, sehingga penelitian ini menunjukkan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Coral Triangle merupakan upaya untuk memenuhi kepentingan nasionalnya yang bersifat multidimensional.¹⁷

Referensi kedua berujuk pada artikel yang ditulis oleh P Linggi dan A Burhanuddin (2019) yang berjudul *The role of triangle initiative on coral reefs, fisheries and food security in Indonesia environmental conservation*, artikel ini menjelaskan bahwa CTI-CFF memiliki peran penting dalam mendukung konservasi lingkungan di Indonesia terutama dalam aspek terumbu karang ketahanan pangan serta perikanan, komitmen CTI-CFF dalam keberlanjutan ekosistem laut juga ditunjukkan melalui berbagai program seperti Coral Reef Rehabilitation and

¹⁶ Magdalena.

¹⁷ Magdalena.

Management Program (COREMAP). Marine Protected Areas(MPA) dan Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM).¹⁸

Artikel ini juga menunjukkan adanya implementasi CTI-CFF di Indonesia tidak selalu berjalan dengan mulus, Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan kerjasama ini, seperti kurangnya koordinasi antar sektor, keterbatasan kapasitas dalam mengelola sumber daya laut maupun masalah birokrasi antar negaranya, namun Indonesia tetap menjalankan kerjasama ini dalam upaya untuk mengatasi permasalahan lingkungan kelautannya yang bersifat lintas batas. Oleh sebab itu keikutsertaan Indonesia dapat dipahami sebagai cara untuk memperoleh manfaat yang tidak dapat dicapai secara unilateral.¹⁹

Literatur yang ketiga adalah penelitian yang relevan dengan kajian ini yaitu tulisan Thomas Risse (2018) berjudul “*Hierarchical and Non-Hierarchical Coordination*” dalam *The Oxford Handbook of Governance and Limited Statehood*. Dalam tulisan tersebut, Risse membahas bagaimana proses governance tidak selalu berlangsung melalui mekanisme hierarkis yang bergantung pada otoritas formal dan kekuatan hukum yang mengikat. Menurut Risse, governance juga dapat berlangsung melalui koordinasi non-hierarkis, yaitu mekanisme kerja sama yang bertumpu pada negosiasi, deliberasi, koordinasi antaraktor, serta penerimaan bersama terhadap institusi dan aturan yang disepakati. Risse menekankan bahwa efektivitas suatu

¹⁸ P. P. Linggi and A. Burhanuddin, “The Role of Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Securities in Indonesia’s Environmental Conservation,” *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 343, no. 1 (October 2019): 012092, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/343/1/012092>.

¹⁹ Linggi and Burhanuddin.

pengaturan governance sangat dipengaruhi oleh legitimasi sosial terhadap institusi governance dan desain kelembagaan yang mampu diterima oleh para aktor yang terlibat. Dengan demikian, keberhasilan suatu kerja sama tidak selalu ditentukan oleh keberadaan sanksi atau otoritas supranasional yang kuat, tetapi juga oleh kemampuan institusi tersebut membangun koordinasi dan mempertahankan komitmen para anggotanya.

Pemikiran Risse tersebut relevan dengan karakteristik Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF) yang bersifat non-legally binding. CTI-CFF tidak memiliki mekanisme sanksi yang kuat terhadap negara anggota, sehingga keberlanjutan kerja samanya sangat bergantung pada komitmen politik, koordinasi regional, dan keterlibatan berbagai aktor negara maupun non-negara. Dalam konteks ini, pendekatan governance dari Risse membantu menjelaskan bahwa kerja sama regional tetap dapat berlangsung meskipun tidak memiliki struktur rezim yang sangat maju atau integrasi yang mendalam seperti organisasi regional lainnya.

Selain itu, Risse juga menjelaskan bahwa governance dalam konteks kontemporer sering melibatkan berbagai aktor selain negara, seperti organisasi internasional, lembaga donor, organisasi non-pemerintah, dan jaringan transnasional yang bersama-sama berkontribusi dalam penyediaan barang publik dan penyelesaian masalah kolektif. Pandangan ini sejalan dengan kondisi CTI-CFF yang melibatkan aktor seperti ADB, USAID, GEF, WWF, *Conservation International*, dan *The Nature*

Conservancy dalam mendukung implementasi program konservasi dan pengelolaan sumber daya laut di kawasan Coral Triangle.

Meskipun memiliki relevansi yang kuat, terdapat perbedaan fokus antara kajian Risse dan penelitian ini. Risse berfokus pada mode koordinasi governance secara umum, khususnya perbedaan antara koordinasi hierarkis dan non-hierarkis dalam berbagai konteks governance. Sementara itu, penelitian ini menggunakan pemikiran tersebut untuk menganalisis mengapa Indonesia tetap mempertahankan komitmen dan keterlibatan aktifnya dalam CTI-CFF meskipun menghadapi berbagai tantangan implementasi, seperti kompleksitas koordinasi kelembagaan, keterbatasan pendanaan, kesenjangan implementasi pusat dan daerah, serta karakter kerja sama yang tidak mengikat secara hukum. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menerapkan perspektif governance Thomas Risse untuk memahami keberlanjutan keterlibatan Indonesia dalam tata kelola kawasan Coral Triangle melalui mekanisme koordinasi regional dan kerja sama non-hierarkis.

Referensi selanjutnya yaitu jurnal *Improving human and environmental conditions through the Coral Triangle Initiative: Progress and challenge* yang ditulis oleh Patrick Christie' Diana M. Pietri. Tulisan ini membahas tentang peran Coral Triangel Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF) dalam pengelolaan kawasan Coral Triangel dibentuk sebagai respons terhadap meningkatnya kerusakan ekosistem laut yang berdampak pada keberlanjutan sumber

daya kelautan dan ketahanan pangan di kawasan .²⁰ CTI-CFF yang juga berfungsi sebagai platform kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan efektifitas pengelolaan sumber laut secara berkelanjutan. Penelitian ini juga menjelaskan implementasi CTI –CFF masih menghadapi berbagai tantangan, dari perbedaan kepentingan antar negara anggota yang masih belum sempurna, koordinasi yang belum optimal serta keterbatasan kapasitas dalam keterbatasan nya ,berbagai tantangan tersebut menunjukan bahwa kerjasama ini meskipun memiliki kerangka kerja yang jelas efektifitas dalam implementasinya.

Penelitian ini memberikan gambaran bahwa kerjasama ini memiliki peran strategi dalam pengelolaan meskipun masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya. Christie et al. menjelaskan bahwa implementasi CTI-CFF menunjukkan sejumlah kemajuan penting, seperti meningkatnya penegakan kawasan konservasi laut (Marine Protected Areas), penguatan kapasitas pengelolaan pada tingkat nasional dan regional, pembentukan kepemimpinan konservasi, serta integrasi perencanaan konservasi, perikanan, dan adaptasi perubahan iklim. Temuan tersebut menunjukkan bahwa CTI-CFF tidak hanya berfungsi sebagai forum kerja sama lingkungan, tetapi juga sebagai mekanisme koordinasi regional yang mendorong penguatan kapasitas tata kelola sumber daya laut di negara-negara anggota.

²⁰ Patrick Christie et al., “Improving Human and Environmental Conditions through the Coral Triangle Initiative: Progress and Challenges,” *Current Opinion in Environmental Sustainability* 19 (April 2016): 169–81, <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2016.03.002>.

Namun demikian, penelitian tersebut juga menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi CTI-CFF, terutama dalam menghubungkan perencanaan pada tingkat regional, nasional, daerah, dan komunitas lokal. Selain itu, keberlanjutan implementasi CTI-CFF sangat bergantung pada komitmen negara anggota, dukungan donor internasional, serta kemampuan para aktor yang terlibat untuk mempertahankan koordinasi dan kerja sama lintas sektor secara berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian Christie et al. memberikan gambaran penting mengenai dinamika tata kelola kawasan Coral Triangle dan tantangan implementasi CTI-CFF sebagai kerja sama regional berbasis kemitraan.²¹

Meskipun memiliki relevansi yang kuat dengan penelitian penulis, terdapat perbedaan fokus antara penelitian Christie et al. dan penelitian ini. Christie et al. lebih menitik beratkan pada evaluasi kemajuan dan tantangan implementasi CTI-CFF secara regional, sedangkan penelitian ini secara khusus berfokus pada faktor-faktor yang mendorong Indonesia tetap mempertahankan komitmen dan keterlibatan aktifnya dalam CTI-CFF meskipun menghadapi berbagai tantangan implementasi, dengan menggunakan perspektif Regional Governance menurut Thomas Risse. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya melengkapi kajian sebelumnya dengan memberikan analisis yang lebih spesifik mengenai keberlanjutan komitmen Indonesia dalam tata kelola kawasan Coral Triangle.

²¹ Christie, P., Pietri, D. M., Stevenson, T. C., Pollnac, R., Knight, M., & White, A. T., "Improving Human and Environmental Conditions through the Coral Triangle Initiative: Progress and Challenges," *Current Opinion in Environmental Sustainability*, no. Environmental Sustainability (2016): 169–81, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cosust.2016.03.002>.

Refrensi terakhir berasal dari artikel jurnal yang tulis oleh Sarah A. Heck dengan judul *Ocean Governance in the Coral Triangle: A Multi-Level Regulatory Governance Structure*, dalam tulisannya Sarah menjelaskan bahwa kerjasama CTI-CFF sebagai “ Multi-level Governence” dan CTI-CFF merupakan sebuah sistem kompleks yang “mengikat” negara.²² Dalam kerangka ini, pengelolaan sumber daya laut tidak lagi bersifat domestik melainkan mengalami proses “*rescaling*” ke tingkat regional sebagai respon terhadap karakteristik permasalahan lingkungan laut yang bersifat lintas batas, CTI-CFF sudah menjadi bagian dari sistem governance Indonesia sendiri, kita bisa melihat bahwa kebijakan nasional pun di sesuaikan dengan CTI-CFF melalui instrumen seperti Regional Plan of Action (RPOA) yang diadopsi ke dalam kebijakan domestik, indonesia tidak hanya ikut namun juga terikat secara struktural.

1.7 Kerangka Konseptual

Penelitian ini berangkat dari fenomena bahwa Indonesia tetap mempertahankan komitmen dan keterlibatan aktifnya dalam Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF) meskipun menghadapi berbagai tantangan implementasi, seperti kompleksitas koordinasi kelembagaan, keterbatasan pendanaan, kesenjangan implementasi pusat dan daerah, serta karakter kerja sama yang bersifat non-legally binding. Fenomena tersebut menunjukkan

²² Sarah A. Heck, “Ocean Governance in the Coral Triangle: A Multi-Level Regulatory Governance Structure,” <https://www.cogitatiopress.com/> Vol 10 No 3, no. <https://www.cogitatiopress.com/politicsandgovernance/issue/view/321> (July 2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.17645/pag.v10i3.5362>.

adanya kondisi yang menarik untuk dianalisis karena secara teoritis negara dapat saja mengurangi keterlibatannya apabila biaya implementasi dianggap lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. Namun, dalam kasus CTI-CFF, Indonesia justru tetap mempertahankan komitmen dan partisipasinya dalam berbagai agenda regional maupun nasional yang berkaitan dengan kerja sama tersebut.

Untuk menjelaskan fenomena tersebut, Penelitian ini menggunakan konsep *Regional Governance* yang dikembangkan oleh *Thomas Risse* untuk memahami bagaimana kerja sama regional dapat dipertahankan dalam menghadapi persoalan lintas batas. Dalam *The Oxford Handbook of Governance and Limited Statehood*, *Risse* (2018). Dalam kajian tersebut, *Risse* menjelaskan bahwa regional governance tidak hanya merujuk pada organisasi regional yang memiliki tingkat integrasi tinggi seperti Uni Eropa, tetapi juga mencakup berbagai bentuk koordinasi antarnegara dan institusi regional dalam mengelola persoalan bersama yang melintasi batas negara. Sebaliknya, berbagai persoalan yang bersifat lintas batas dapat dikelola melalui koordinasi non-hierarkis, yaitu proses kerja sama yang dibangun melalui negosiasi, koordinasi antaraktor, pembagian peran kelembagaan, serta legitimasi institusi yang diterima oleh para aktor yang terlibat. Dengan demikian, efektivitas suatu kerja sama tidak hanya ditentukan oleh kekuatan aturan hukum, tetapi juga oleh kemampuan institusi regional dalam membangun koordinasi dan mempertahankan komitmen negara. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan suatu kerja sama regional tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan hukum atau mekanisme sanksi, melainkan juga oleh kemampuan negara-negara anggota untuk membangun

koordinasi, mempertahankan legitimasi institusi regional, dan menyesuaikan mekanisme kerja sama dengan kebutuhan kawasan. Dalam karya Risse yang lain mengenai *Hierarchical and Non-Hierarchical Coordination* (2018), dijelaskan bahwa governance dapat berlangsung melalui mekanisme koordinasi non-hierarkis yang bertumpu pada negosiasi, deliberasi, dan kerja sama antaraktor, bukan hanya melalui paksaan atau otoritas formal yang mengikat secara hukum. Efektivitas governance menurut Risse sangat dipengaruhi oleh legitimasi institusi dan desain kelembagaan yang mampu diterima oleh para aktor yang terlibat.

Konsep tersebut relevan dengan karakteristik Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF). CTI-CFF merupakan kerja sama regional yang memiliki keterhubungan ekologi yang tinggi serta menjadi habitat bagi keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia. Berbagai persoalan di kawasan ini, seperti degradasi terumbu karang, penurunan stok ikan, serta ancaman terhadap ketahanan pangan masyarakat pesisir, memiliki karakter lintas batas karena ekosistem laut, migrasi spesies, dan aktivitas pemanfaatan sumber daya tidak berhenti pada batas yurisdiksi satu negara. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan tersebut memerlukan mekanisme koordinasi regional yang memungkinkan negara-negara anggota bekerja sama dalam menyusun kebijakan, mengimplementasikan program konservasi, serta menjaga keberlanjutan sumber daya laut secara kolektif.

Dalam konteks Indonesia, kebutuhan untuk mengelola sumber daya laut dan menjaga ketahanan pangan masyarakat pesisir menjadi salah satu kepentingan strategis yang mendorong keberlanjutan keterlibatan Indonesia dalam CTI-CFF.

Sebagai negara yang memiliki wilayah terbesar di kawasan Coral Triangle, Indonesia menghadapi berbagai tantangan implementasi, seperti kompleksitas koordinasi kelembagaan, keterbatasan pendanaan, kesenjangan implementasi pusat dan daerah, serta karakter kerja sama yang bersifat sukarela. Namun demikian, Indonesia tetap mempertahankan keterlibatannya melalui berbagai mekanisme kerja sama regional yang tersedia dalam CTI-CFF.

Untuk mengoperasionalkan konsep Regional Governance dalam konteks penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa dimensi analisis yang disesuaikan dengan karakteristik CTI-CFF, yaitu *regional ownership*, koordinasi antaraktor, *policy network* dan *kemitraan internasional*, serta *shared norms* dan *collective responsibility*. Dimensi-dimensi tersebut tidak diposisikan sebagai elemen baku yang secara eksplisit dirumuskan oleh Risse, melainkan sebagai penjabaran analitis yang digunakan peneliti untuk melihat bagaimana mekanisme governance bekerja dalam kasus CTI-CFF.

Penggunaan konsep Regional Governance menjadi penting karena penelitian ini berupaya menjelaskan fenomena bahwa Indonesia tetap mempertahankan komitmen dan keterlibatan aktifnya dalam CTI-CFF meskipun menghadapi berbagai tantangan implementasi, seperti kompleksitas koordinasi kelembagaan, keterbatasan pendanaan, kesenjangan implementasi pusat dan daerah, serta karakter kerja sama yang tidak mengikat secara hukum. Dari perspektif Regional Governance, keberlanjutan keterlibatan Indonesia dapat dipahami bukan semata-mata sebagai hasil kepatuhan terhadap aturan formal, tetapi sebagai konsekuensi dari adanya

kepentingan bersama dalam pengelolaan kawasan Coral Triangle, kebutuhan koordinasi lintas batas, keterikatan institusional sebagai negara penggagas dan tuan rumah *Regional Secretariat*, serta keberadaan jaringan kemitraan regional dan internasional yang mendukung keberlangsungan kerja sama tersebut. Dengan demikian, konsep *Regional Governance* Thomas Risse memberikan landasan yang relevan untuk menganalisis mengapa Indonesia tetap mempertahankan keterlibatannya dalam CTI-CFF meskipun kerja sama tersebut tidak memiliki karakteristik rezim internasional yang sangat maju atau mengikat secara hukum.

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut John W. Creswell, penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari permasalahan sosial, di mana peneliti berusaha menginterpretasikan fenomena berdasarkan perspektif partisipan atau konteks yang diteliti.²³ Melalui pendekatan deskriptif –analitis penelitian ini tidak hanya menggambarkan fenomena yang terjadi tetapi juga menganalisis hubungan antara berbagai faktor seperti kepentingan nasional, serta keterikatan dalam sistem *Regional Governance*. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam alasan Indonesia dalam mempertahankan keanggotaannya dalam kerja sama CTI-CFF.

²³ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th ed. (SAGE Publications., 2018).

1.8.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan pendekatan sistematis yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan penelitian dan memperoleh pengetahuan yang relevan. Sementara itu, metodologi mengacu pada serangkaian langkah atau prosedur yang dijalankan guna menjawab pertanyaan mengenai bagaimana suatu dinamika dalam hubungan internasional dapat terjadi.²⁴ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif analitis. Melalui pendekatan deskriptif –analitis penelitian ini tidak hanya menggambarkan fenomena yang terjadi tetapi juga menganalisis hubungan antara berbagai faktor seperti kepentingan nasional, serta keterikatan dalam sistem Regional Governence Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam alasan Indonesia dalam mempertahankan keanggotaannya dalam kerja sama CTI-CFF.

1.8.2 Batasan Penelitian

Penelitian ini memfokuskan analisis pada periode waktu tahun 2015 hingga 2025, yaitu sejak pembentukan sekretariat Regional CTI-CFF yang bermakas di Manado hingga kepada perkembangan implementasi kerjasama dalam beberapa tahun terakhir. Pemilihan rentang waktu ini dipilih untuk melihat keberlanjutan Indonesia dalam kerjasama ini ditengah munculnya berbagai tantangan dalam pelaksanaan program dan koordinasi aktor di

²⁴ Mohtar Mas'oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, 1st ed. (Jakarta: LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial), 1990).

dalamnya hingga pada tahun yang disebutkan. Batasan ini akan memastikan bahwa data yang dikumpulkan relevan dengan topik pembahasan yang diteliti

1.8.3 Unit Analisis dan Tingkat Analisis

Dalam suatu penelitian, terdapat dua fokus utama yang dikenal sebagai unit terikat, yaitu unit analisis dan unit eksplanasi. Unit analisis (variabel dependen) merupakan pusat perhatian dalam penelitian yang berfungsi sebagai objek yang akan dijelaskan, dianalisis, atau diprediksi perilakunya.²⁵

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Indonesia sebagai aktor negara yang terlibat dalam kerjasama Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF). Penelitian ini berfokus pada bagaimana Indonesia mempertahankan kenaggotaan aktif nya hingga saat ini meskipun menghadapi kendala dan tantangan dalam pelaksanaan kerjasama tersebut.

Pemilihan Indonesia sebagai unit analisis didasarkan kepada posisi Indonesia sebagai salah satu penggagas utama CTI-CFF sekaligus sebagai negara dengan wilayah terumbu karang terbesar di kawasan Coral Triangle.

Tingkat analisis dalam penelitian ini berada pada tingkat regional dan nasional. Menurut Joshua S. Goldstein dan Jon C. Pevehouse, terdapat empat tingkatan analisis dalam studi hubungan internasional, yaitu tingkat global, antarnegara, domestik, dan individu.²⁶

²⁵ Mas'oed.

²⁶ Joshua Goldstein Pevehouse, Jon C., *International Relations, 2013-2014 Update*, 10th (diperbarui 2014, cakupan isu hingga tahun 2013) (Boston (edisi internasional); New Jersey / Upper Saddle River (edisi Amerika): Pearson Education, 2013), <https://openlibrary.org/books/OL25436887M>.

Tingkat analisis yang digunakan dalam penelitian adalah tingkat regional, karena digunakan untuk melihat bagaimana sistem Regional Governance dalam CTI-CFF membentuk aturan, norma, dan mekanisme kerja sama antar negara anggota. Dalam konteks ini, CTI-CFF dipahami sebagai bentuk tata kelola regional yang mempengaruhi perilaku negara melalui koordinasi dan komitmen bersama dalam pengelolaan sumber daya laut.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah mengumpulkan data-data sekunder melalui studi kepustakaan dari berbagai sumber, data sekunder akan dihimpun melalui studi kepustakaan (*library research*). Sumber data sekunder meliputi jurnal ilmiah, artikel penelitian yang relevan, referensi buku, website atau dokumen resmi CTI-CFF, laporan pemerintah, serta publikasi lain yang relevan dengan isu kerjasama regional dan pengelolaan lingkungan laut. Sementara itu untuk mengumpulkan bukti empiris yang sudah dilakukan oleh para ahli di penelitian sebelumnya. Peneliti mengambil sumber dari web resmi atau akun sosial media resmi dari CTI-CFF dan pemerintahan Indonesia. Selain itu, peneliti juga menggunakan dokumen resmi seperti Regional Plan Of Action (RPOA) serta kebijakan pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan mekanisme kerjasama Indonesia dalam kerjasama ini. Data yang diperoleh akan dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai mengapa Indonesia masih mempertahankan keanggotaannya dalam kerjasama ini jika banyak terdapat hambatan dalam pelaksanaannya.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai objek yang diteliti berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Analisis deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena, kejadian, atau peristiwa tanpa menguji hipotesis atau membuat prediksi.²⁷

Dalam penelitian ini, proses analisis data dilakukan dengan mengacu pada tahapan analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh *Matthew B. Miles* dan *A. Michael Huberman*, yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses memilih, menyederhanakan, dan memfokuskan data yang diperoleh dari berbagai sumber agar sesuai dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data-data yang berkaitan dengan implementasi CTI-CFF, kepentingan nasional Indonesia, tantangan kerja sama regional, serta konsep regional governance. Tahap kedua adalah penyajian data (*data display*), yaitu proses menyusun dan mengorganisasikan data dalam bentuk narasi yang sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam memahami hubungan antar data. Dalam tahap ini, data yang telah diklasifikasikan kemudian disusun berdasarkan tema-tema tertentu, seperti manfaat kerja sama CTI-CFF bagi Indonesia, tantangan

²⁷ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 60.

implementasi, dan pengaruh struktur governance regional terhadap keberlanjutan keterlibatan Indonesia.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses menginterpretasikan data yang telah dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pada tahap ini, peneliti menganalisis bagaimana konsep Regional Governance dapat menjelaskan keberlanjutan keterlibatan Indonesia dalam CTI-CFF di tengah berbagai hambatan implementasi yang dihadapi.

Melalui teknik analisis data ini penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara kepentingan nasional, tantangan implementasi, serta keterikatan Indonesia dalam CTI-CFF.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, jenis dan pendekatan penelitian, unit dan tingkat analisis, teknik pengumpulan data dan teknis analisis data.

BAB II: DINAMIKA CTI-CFF DAN POSISI INDONESIA DALAM TATA KELOLA KAWASAN

Bab ini membahas perkembangan CTI-CFF sebagai bentuk kerjasama regional dalam pengelolaan sumber daya laut. Pembahasan diawali dengan ;atar belakang

mengapa terjadinya CTI-CFF, tujuan dan mekanisme nya kemudian pembahasan tentang posisi Indonesia dalam kerjasama ini sebagai negara pengagas. Selain itu pada bab ini juga menguraikan berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi Indonesia baik pada tingkat regional ataupun nasionalnya seperti keterbatasan pendanaan, serta tantangan Indonesia dalam implementasi kebijakannya.

BAB III: KOMITMEN KETERLIBATAN INDONESIA DALAM CTI-CFF

Pada bab ini membahas berbagai faktor yang menyebabkan Indonesia tetap mempertahankan keanggotaanya dalam kerjasama ini, pembahasan tidak hanya melihat faktor kepentingan nasional Indonesia, namun juga pertimbangan pada aspek kepemimpinan regional, komitmen terhadap tata kelola kawasan, serta keterikatan Indonesia dalam mekanisme kerja sama regional ini

BAB IV: FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG INDONESIA TETAP AKTIF DALAM CTI-CFF

Bab ini merupakan inti penelitian yang berisi analisis menggunakan konsep, seluruh temuan pada bab sebelumnya dianalisis untuk menjelaskan bagaimana konsep ini dalam melihat mengapa Indonesia tetap ikut dalam kerja sama ini. analisis difokuskan pada bagaimana konsep ini nantinya

BAB V: PENUTUP

Bab ini menyimpulkan hasil penelitian, memberikan kesimpulan dan gambaran keseluruhan dari temuan-temuan yang ada, serta memberikan saran kepada penelitian selanjutnya tentang kerja sama CTI-CFF di masa mendatang.